



Analisis Pengaruh Migrasi Masuk, Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Pulau Sumatera

Nia Diniati, Yusni Maulida, Toti Indrawati

Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau, Pekanbaru, Riau, Indonesia

Abstract

Received: 3 Januari 2026

Revised: 13 Januari 2026

Accepted: 28 Februari 2026

This study aims to understand the influence of In-Migration, Education, and Minimum Wages on Poverty on Sumatra Island. This study uses quantitative methods. The type of data used in this study is secondary data obtained from the Indonesian Central Bureau of Statistics and the Village Community Empowerment Service and the Population and Civil Registration Service of Riau Province. Through the panel data regression method with the Random Effect Model (REM) approach. By using the Eviews Program, the results obtained show that partially, the variables of In-Migration (X1), and Minimum Wages (X3) do not have a significant effect on Poverty on Sumatra Island, while the variable of Education (X2) has a negative and significant effect on poverty on Sumatra Island. Simultaneously the variables of In-Migration (X1), Education (X2), and Minimum Wages (X3) influence poverty on Sumatra Island. With an Adjusted R-squared value of 0.616290, it shows that the variables of In-Migration (X1), Education (X2) and Minimum Wage (X3) influence Poverty on Sumatra Island by 61.6%, while the remaining 38.4% is obtained from variables outside this study.

Keywords: In-migration, Education, Minimum Wage, Poverty.

(*) Corresponding Author: nia.diniati5152@student.unri.ac.id, yusni.maulida@lecturer.unri.ac.id, toti.indrawati@lecturer.unri.ac.id

How to Cite: Diniati, N., Maulida, Y., & Indrawati, T. (2026). Analisis Pengaruh Migrasi Masuk, Pendidikan dan Upah Minimum Terhadap Kemiskinan di Pulau Sumatera. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 12(5.D), 220-232. Retrieved from <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/14214>

PENDAHULUAN

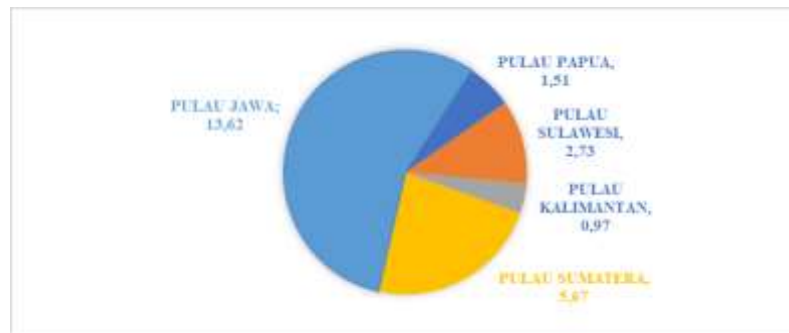
Indonesia merupakan salah satu negara besar di Benua Asia dan terbesar di Kawasan Asia Tenggara. Dengan luas wilayah daratan sebesar 1,91 juta km² dan luas wilayah perairan mencapai 6,32 juta km². Penduduk Indonesia merupakan penduduk terbanyak dengan posisi urutan keempat di dunia. Namun banyaknya jumlah penduduk diikuti dengan banyaknya jumlah penduduk miskin di Indonesia. kemiskinan bukanlah hal yang baru dan hingga saat ini masih menjadi permasalahan dan beban pembangunan. Pada tahun 2024, jumlah penduduk miskin di Indonesia mencapai 24,06 juta jiwa. Angka ini menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 25,90 juta jiwa. Meskipun angka kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan dari tahun sebelumnya akan tetapi, apabila ditinjau secara parsial di setiap daerah ternyata terdapat beberapa daerah yang selama beberapa tahun terakhir angka kemiskinannya terus mengalami peningkatan.

Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan seseorang dari segi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Kemiskinan dapat menjadi tolak ukur dari keberhasilan suatu negara dalam melaksanakan pembangunan. Hal ini dikarenakan



setiap kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan memiliki tujuan akhir yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penurunan angka kemiskinan (Iwang, 2023).

Angka Kemiskinan di Indonesia cenderung bervariasi antar daerah. Dapat dilihat pada gambar 1.1 persentase penduduk miskin di Pulau Besar Indonesia. Pulau Jawa merupakan wilayah dengan jumlah penduduk miskin tertinggi, sebaliknya Pulau Kalimantan menjadi wilayah dengan jumlah penduduk miskin terendah.



Sumber: BPS Indonesia, 2025.

Gambar 1. Persentase Penduduk Miskin di Pulau Besar Indonesia Tahun 2024

Pulau Jawa menempati posisi pertama dengan jumlah penduduk miskin tertinggi yaitu mencapai 13.62 persen. Posisi kedua setelah pulau Jawa di tempati oleh Pulau Sumatera yaitu mencapai 5.67 persen. Jumlah kemiskinan yang relatif tinggi di Pulau Sumatera juga menunjukkan buruknya kondisi sosial ekonomi dan ketenagakerjaan di provinsi-provinsi di Pulau tersebut. Tingkat kemiskinan yang tinggi di Pulau Sumatera Dapat di lihat pada tabel 1.1 persentase penduduk miskin menurut provinsi di Pulau Sumatera. Menurut data badan pusat statistik, tingkat kemiskinan di Provinsi-Provinsi di Pulau Sumatera cenderung fluktuatif, akan tetapi angka kemiskinan di beberapa provinsi selama dua tahun terakhir mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 1. Persentase Penduduk Miskin Menurut Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2024 (Persen)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Aceh	14,99	15,33	14,64	14,45	14,23
2.	Sumatera Utara	8,75	9,01	8,42	8,15	7,99
3.	Sumatera Barat	6,28	6,63	5,92	5,95	5,97
4.	Riau	6,82	7,12	6,78	6,68	6,67
5.	Jambi	7,58	8,09	7,62	7,58	7,10
6.	Sumatera Selatan	12,66	12,84	11,9	11,78	10,97
7.	Bengkulu	15,03	15,22	14,62	14,04	14,04

8.	Lampung	12,34	12,62	11,57	11,11	10,69
9.	Kepulauan Bangka Belitung	4,53	4,9	4,45	4,52	4,55
10.	Kepulauan Riau	5,92	6,12	6,24	5,69	5,37
	Sumatera	9,4	9,7	9,2	8,9	8,7

Sumber: BPS Indonesia, 2025.

Data diatas menunjukkan tingkat kemiskinan tertinggi di Pulau Sumatera pada tahun 2021 mencapai 9,7 persen atau sekitar 6.039.308 jiwa dibandingkan dengan pulau-pulau besar yang ada di Indoensia Pulau Sumatera berada di posisi nomor dua setelah Pulau Jawa yaitu sebesar 12,56 juta jiwa dan paling terendah adalah Pulau Kalimantan sebesar 963.490 jiwa. Menurut provinsi di Pulau Sumatera tingkat kemiskinan tertinggi pada tahun 2024 di tempati oleh Provinsi Aceh mencapai 14,23 persen atau sekitar 718.960 jiwa. Tingkat kemiskinan terendah di tempati oleh Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai 4,55 persen atau sekitar 69.950 jiwa.

Menurunnya tingkat kemiskinan di Pulau Sumatera menunjukan bahwa sejumlah penduduk miskin mampu keluar dari kemiskinan dan mengindikasikan adanya perbaikan secara rata-rata pada standar hidup dan kesejahteraan penduduk miskin. Faktor pendorong turunnya jumlah penduduk miskin di Pulau Sumatera yaitu, tingginya tingkat pendidikan dan peningkatan upah minimum.

Banyak faktor-faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan, seperti faktor migrasi masuk, tingkat pendidikan dari tenaga kerja dan upah minimum. Migrasi masuk adalah perpindahan penduduk dari daerah asal menuju daerah tujuan. Besar kecilnya orang yang bermigrasi di suatu daerah sangat berdampak pada banyak sedikitnya jumlah penduduk miskin di daerah yang dituju. apabila jumlah angka migrasi masuk terlalu banyak dan tak terkendali yang juga tidak disertai dengan tersedianya lapangan pekerjaan yang memadai untuk menampung para migran tersebut. Hal ini akan menimbulkan bertambahnya angka pengangguran dan kemiskinan didaerah tersebut. Berikut data migrasi yang dapat di lihat pada tabel 1.2 jumlah migrasi masuk di Pulau Sumatera.

Tabel 1 . Jumlah Migrasi Masuk di Pulau Sumatera Tahun 2020-2024 (Jiwa)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Aceh	79.034	67.157	37.389	85.847	59.566
2.	Sumatera Utara	116.619	109.302	118.960	264.001	296.546
3.	Sumatera Barat	38.870	91.808	45.065	110.414	150.655
4.	Riau	93.515	100.488	67.830	157.057	202.343
5.	Jambi	44.460	41.792	30.780	98.063	110.554
6.	Sumatera Selatan	131.814	98.940	64.075	166.646	230.543
7.	Bengkulu	17.919	11.450	16.871	43.367	50.122
8.	Lampung	115.135	80.338	57.504	145.992	120.546

9.	Kep. Belitung	Bangka	34.865	12.312	13.312	29.073	31.769
10.	Kepulauan Riau		60.178	63.723	23.350	76.140	82.100
Sumatera			73.240	67.731	47.513	117.660	133.472

Sumber: Buku Profil Kependudukan Indonesia, 2025.

Berdasarkan tabel 1.2 menunjukkan perkembangan migrasi masuk di Pulau Sumatera bersifat fluktuatif dari tahun 2020 hingga 2024, dimana jumlah migrasi masuk tidak memiliki ketetapan atau cenderung naik turun dalam beberapa tahun terakhir. Migrasi masuk paling tinggi di Pulau Sumatera yaitu pada tahun 2024 mencapai 133.472 jiwa. Menurut provinsi migrasi masuk tertinggi pada tahun 2024 adalah Provinsi Sumatera Utara dengan jumlah migrasi sebesar 296.546 jiwa. Dan migrasi masuk paling rendah adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan jumlah migrasi masuk sebesar 31.769 jiwa.

Berbagai faktor penentu yang meningkatkan migrasi yaitu, faktor ekonomi dan non ekonomi. Kondisi sosial ekonomi di daerah asal yang tidak memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan hidup, mendorong mobilisasi penduduk dengan tujuan mempunyai nilai dengan kefaedahan yang lebih tinggi di daerah tujuan. Salah satu cara yang baik dilakukan untuk mengatasi kesenjangan kesempatan ekonomi adalah dengan migrasi dari desa ke kota.

Selain faktor migrasi masuk, Pendidikan juga merupakan faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan. Pendidikan merupakan hal yang penting karena setiap lapangan kerja yang tersedia membutuhkan kemampuan khusus pada bidangnya. Tingkat pendidikan sangat mempengaruhi kualitas tenaga kerja, tingginya tingkat pendidikan akan cenderung menentukan kualitas sumber daya manusia dari tenaga kerja tersebut. Tingkat pendidikan di Pulau Sumatera dapat dilihat pada tabel 1.3, dimana rata-rata lama sekolah atau pendidikan di Pulau Sumatera mengalami peningkatan setiap tahunnya.

Tabel 2. Rata-Rata Lama Sekolah/Pendidikan di Pulau Sumatera 2020-2024 (Tahun)

No.	Provinsi	Tahun					
		2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Aceh	9,33	9,37	9,44	9,55	9,95	
2.	Sumatera Utara	9,54	9,58	9,71	9,82	10,18	
3.	Sumatera Barat	8,99	9,07	9,18	9,28	9,72	
4.	Riau	9,14	9,19	9,22	9,32	9,69	
5.	Jambi	8,55	8,56	8,57	8,59	9,26	
6.	Sumatera Selatan	8,24	8,30	8,37	8,50	8,98	
7.	Bengkulu	8,84	8,87	8,91	9,03	9,40	
8.	Lampung	8,05	8,08	8,18	8,29	8,80	
9.	Kepulauan Belitung	8,06	8,08	8,11	8,25	8,78	
10.	Kepulauan Riau		10,12	10,18	10,37	10,41	10,65
Sumatera			8,88	8,92	9,00	9,10	9,54

Sumber: BPS Indonesia, 2025.

Di Pulau Sumatera rata-rata lama sekolah dalam lima tahun terakhir mengalami peningkatan secara terus menerus pada tahun 2020 mencapai 8,88 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 9,54 tahun. Rata-rata lama sekolah paling tinggi di

Pulau Sumatera ditempati oleh Provinsi Kepulauan Riau, dimana pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Kepulauan Riau adalah 10,12 tahun dan meningkat pada tahun 2024 mencapai 10,65 tahun. Sedangkan rata-rata lama sekolah paling rendah di Pulau Sumatera adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, pada tahun 2020 rata-rata lama sekolah penduduk Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah 8,06 tahun dan meningkat pada tahun 2024 mencapai 8,78 tahun. Peningkatan ini menunjukkan bahwa program pendidikan di Pulau Sumatera sudah cukup baik.

Selain dari upah minimum dan pendidikan, ada faktor yang sangat mempengaruhi jumlah kemiskinan yaitu Upah minimum. Penetapan pada tingkat upah minimum provinsi (UMP) yang diberlakukan pemerintah memberikan dampak terhadap besarnya tingkat kemiskinan yang ada. Dimana semakin tinggi upah pada suatu daerah maka dapat dikatakan membaiknya perekonomian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Pada tabel 1.4 dapat di lihat jumlah Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera, dimana upah minimum provinsi tertinggi di Pulau Sumatera 2024 adalah Provinsi Bangka Belitung, sedangkan upah minimum Provinsi paling rendah di Pulau Sumatera adalah Provinsi Bengkulu.

Tabel 3. Upah Minimum Provinsi di Pulau Sumatera Tahun 2020-2024 (Rupiah)

No.	Provinsi	Tahun				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Aceh	3.165.031	3.165.031	3.166.460	3.413.666	3.460.672
2.	Sumatera Utara	2.499.423	2.499.423	2.522.609	2.710.493	2.809.915
3.	Sumatera Barat	2.484.041	2.484.014	2.512.539	2.742.476	2.811.449
4.	Riau	2.888.564	2.888.564	2.938.564	3.191.662	3.294.625
5.	Jambi	2.630.162	2.630.162	2.649.034	2.943.033	3.037.121
6.	Sumatera Selatan	3.043.111	3.043.111	3.144.446	3.404.177	3.456.874
7.	Bengkulu	2.213.604	2.215.000	2.238.094	2.418.280	2.507.079
8.	Lampung	2.432.002	2.432.001	2.440.486	2.633.284	2.716.497
9.	Kepulauan Bangka Belitung	3.230.024	3.230.023	3.264.884	3.498.479	3.640.000
10.	Kepulauan Riau	3.005.460	3.005.460	3.050.172	3.279.194	3.402.492
	Sumatera	2.759.142	2.759.278	2.792.728	3.023.474	3.113.672

Sumber: BPS Indonesia, 2025.

Upah Minimum Provinsi (UMP) di Pulau Sumatera tergolong besar dibandingkan dengan upah minimum di Pulau Jawa. Upah minimum provinsi di Pulau Sumatera 2024 telah berada di atas 2 juta. Sedangkan upah minimum provinsi di Pulau Jawa 2024 sebagian besar masih Rp 1,8 juta, kecuali UMP di DKI Jakarta yang mencapai 4,9 juta. Upah minimum provinsi paling tinggi di Pulau Sumatera 2024 adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebesar Rp 3.640.000, sedangkan upah minimum provinsi paling rendah di Pulau Sumatera 2024 adalah Provinsi Bengkulu sebesar Rp 2.507.079.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Pulau Sumatera, diantaranya adalah migrasi masuk, pendidikan dan upah minimum. Pulau Sumatera dikenal sebagai penyedia lapangan pekerjaan yang besar baik dari sektor pertanian, sektor industri, sektor perdagangan, sektor pertambangan sektor jasa dan lain-lain yang pada umumnya belum dikelola secara

maksimal. Penelitian ini dianggap penting karena tingginya angka kemiskinan tidak sejalan dengan teori lingkaran setan kemiskinan dimana teori berpendapat bahwa “a poor country is poor because it is poor” (negara miskin itu karena memang miskin) akan tetapi Pulau Sumatera tergolong Pulau yang kaya salah satunya yaitu kaya akan sumberdaya tetapi berbanding terbalik dengan yang terjadi di lapangan dimana penduduk miskin di Pulau Sumatera tergolong tinggi. Hal inilah membuat peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera dengan pengaruh variabel migrasi masuk, pendidikan dan upah minimum terhadap Kemiskinan di Pulau Sumatera.

LANDASAN TEORI

Teori Utama

1. Teori Lingkaran Setan Kemiskinan (Nurkse, 1953)

Teori ini diprakarsai oleh Nurkse (1953) bahwa “a poor country is poor because it is poor” (negara miskin itu karena memang miskin). Teori lingkaran setan kemiskinan yaitu teori yang menyatakan adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal yang pada akhirnya menyebabkan rendahnya produktivitas. Rendahnya produktivitas tersebut mengakibatkan rendahnya pendapatan yang mereka terima sehingga menyebabkan rendahnya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan.

Teori Pendukung

1. Teori Migrasi menurut Munir (2010)

Menurut Munir (2010) migrasi merupakan salah satu dari tiga faktor dasar yang mempengaruhi pertumbuhan penduduk, faktor lainnya adalah kelahiran dan kematian. Faktor tersebut akan menyebabkan perubahan-perubahan dalam jumlah, komposisi, struktur penduduk dan pertumbuhan penduduk. Hal ini juga akan berdampak terhadap kondisi ketenagakerjaan, yaitu semakin tingginya jumlah penduduk yang berada pada usia kerja yang mencari dan membutuhkan pekerjaan. Keadaan inilah yang akan menjadi pendorong seseorang untuk berpindah ke suatu tempat yang dianggap mampu memberikan kebutuhan hidup yang layak (Santoso, 2012).

2. Teori Human Capital menurut Todaro dalam (Nurkholis, 2018)

Teori Human Capital menurut Todaro dalam (Nurkholis, 2018), bahwa Human Capital dapat diukur melalui bidang pendidikan dan pelatihan dapat menjadi nilai tambah seseorang. Hal ini dapat dijelaskan apabila semakin tinggi pendidikan seseorang atau semakin banyak mengikuti pelatihan maka kemampuan dan keterampilan yang dimiliki semakin tinggi. Ketika penduduk memiliki pendidikan yang tinggi, penduduk akan memiliki keterampilan sehingga akan menghasilkan produktivitas yang tinggi pula. Hal ini akan memudahkan penduduk dalam mencari pekerjaan sehingga pengangguran dan kemiskinan akan berkurang.

3. Teori Upah Alami menurut David Ricardo

Teori upah alami (natural wage) disebut juga teori upah normal. Teori ini dikemukakan oleh David Ricardo, yang membagikan upah menjadi dua macam, yakni upah alami dan upah pasar. Upah alami adalah upah yang besarnya

bergantung pada kekuatan permintaan dan penawaran tenaga kerja di pasar. Upah alami merupakan upah yang dipakai sebagai acuan agar pekerja hidup layak. Adapun yang sesungguhnya diterima pekerja adalah upah pasar. Bila upah pasar lebih tinggi dari upah alami maka kemakmuran akan meningkat. Peningkatan atau penambahan penawaran tenaga kerja mengakibatkan tingkat upah pasar menjadi turun mendekati atau bahkan di bawah upah alami. Ini terjadi karena penawaran tenaga kerja lebih banyak dibanding permintaan tenaga kerja. Jika penawaran tenaga kerja menjadi berkurang akan berdampak pada meningkatnya upah pasar (Tiwow, 2020).

Hubungan Pendidikan dengan Kemiskinan

Menurut Ayu dan Faisal (2021) pendidikan dan kemiskinan memiliki hubungan dimana semakin tinggi rata-rata pendidikan di suatu daerah maka akan mengalami peningkatan pada kualitas sumber daya manusia pada suatu daerah tersebut, sehingga meningkatkan kemungkinan mendapat pekerjaan lebih mudah. Mekanisme dalam penuntasan kemiskinan ialah dengan pengembangan human capital terutama pendidikan dan kesehatan. Pendidikan mengurangi ketimpangan dan kemiskinan secara langsung, yaitu dengan meningkatkan produktivitas bagi golongan miskin, dan memperbaiki kesempatan kerja mereka untuk memperoleh pekerjaan dengan upah yang lebih baik. Secara tidak langsung, pendidikan memberikan kemampuan yang lebih bagi golongan miskin untuk memperoleh bagian mereka dari total pendapatan. Oleh karena itu dalam memberantas kemiskinan, salah satu caranya dengan meningkatkan pendidikan.

Hubungan Upah Minimum dengan Kemiskinan

Menurut Ningsih et al., (2023) besarnya upah minimum tentunya berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan pekerja dengan keluarganya yang ditentukan oleh besar kecilnya upah yang diterima. Dari segi perusahaan, sangat berhati-hati dalam meningkatkan besarnya upah kepada pekerja meskipun proses pengupahan telah diatur undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat upah berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan karena variabel ini menyangkut kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Pulau Sumatera, pemilihan Pulau Sumatera karena pulau ini mengalami migrasi masuk yang tinggi dan memiliki tingkat pendidikan serta upah minimum yang meningkat tiap tahunnya, namun angka kemiskinan di Pulau Sumatera masih tinggi. Hal tersebut terjadi karena jumlah penduduk yang mengalami peningkatan akan tetapi tidak di dukung oleh infrastruktur dan layanan yang memadai dapat memperburuk kondisi kemiskinan, serta migrasi masuk yang tinggi sering kali tidak meningkatkan kesejahteraan, tetapi mengubah penduduk miskin migran di daerah asal menjadi penduduk miskin di daerah tujuan tanpa akses yang lebih baik terhadap peluang ekonomi sehingga mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan.

Data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data-data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi berupa dokumen dan data ini diperoleh langsung dari

instansi terkait dan juga melalui website Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia yaitu <https://www.bps.go.id>.

Metode pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah dengan menggunakan metode dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari Metode ini merupakan cara untuk mendapatkan laporan tahunan tentang variabel yang terkait. Dengan metode ini penulis memperoleh data migrasi masuk, pendidikan dan upah minimum serta kemiskinan tahun 2014-2024.

Penelitian ini menggunakan pengolahan data dengan program software Eviews versi 12 untuk melihat hasil perhitungan yang menunjukkan adanya pengaruh antara variabel bebas terhadap variabel terikat.

Analisis data panel digunakan dalam penelitian ini. Dimana data panel adalah gabungan atau kombinasi dari data runtut waktu (time series) dan data cross-section. Data time series yang digunakan pada penelitian ini yaitu tahun 2014 sampai dengan tahun 2024. Sedangkan data cross-section pada penelitian ini yaitu 10 Provinsi di Pulau Sumatera.

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Keadaan Alam Pulau Sumatera

Pulau Sumatera berdasarkan luasnya merupakan pulau keenam terbesar di dunia. Pulau Sumatera terletak di bagian barat gugusan Kepulauan Indonesia yang terdiri dari daerah daratan dan perairan, dengan luas daerah sebesar 473.481 km². Secara geografis Pulau Sumatera berada di posisi 6°LU - 6°LS dan di antara 95°BT -109°BT. Di sebelah utara berbatasan dengan Teluk Belanga, disebelah timur berbatasan dengan Selat Malaka, disebelah selatan berbatasan dengan Selat Sunda dan disebelah barat berbatasan dengan Samudera Hindia.

Pulau Sumatera membujur dari barat laut ke arah tenggara dan melintasi garis khatulistiwa, seolah membagi Pulau Sumatera menjadi dua bagian yaitu Sumatera belahan bumi utara dan Sumatera belahan bumi selatan. Pegunungan bukit barisan dengan beberapa puncaknya yang melebihi 3.000 m di atas permukaan laut, merupakan barisan gunung berapi aktif, membentang sepanjang sisi barat pulau dari ujung utara ke arah selatan, sehingga membuat dataran di sisi barat pulau relatif sempit dengan pantai yang terjal dan dalam ke arah Samudera Hindia dan dataran timur pulau yang luas dan landai dengan pantai yang luas dan dangkal ke arah Selat Malaka, Selat Bangka dan Laut China Selatan. Sepanjang bukit barisan tersebut terdapat puluhan gunung baik tidak aktif maupun gunung berapi yang aktif.

Pulau Sumatera ditutupi oleh hutan tropik primer dan hutan tropik sekunder yang lebat dengan tanah yang subur. Gunung berapi tertinggi di Sumatera adalah Gunung Kerinci di Provinsi Jambi, dan gunung-gunung berapi lainnya yang cukup terkenal yaitu Gunung Leuser di Provinsi Aceh dan Gunung Dempo di perbatasan Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Bengkulu. Pulau Sumatera Merupakan kawasan episentrum gempa bumi karena dilintasi oleh patahan kerak bumi di sepanjang Bukit Barisan, yang disebut Patahan Sumatera dan patahan kerak bumi di dasar Samudera Hindia di sepanjang lepas pantai sisi barat Sumatera. Di Pulau Sumatera juga terdapat beberapa perairan seperti danau, rawa, sungai dan lainnya. Danau di Pulau Sumatera diantaranya yaitu, Danau Laut Tawar (Provinsi Aceh),

Danau Toba (Provinsi Sumatera Utara), Danau Singkarak, Danau Maninjau, Danau Diatas, Danau Dibawah dan Danau Talang (Provinsi Sumatera Barat), Danau Kerinci (Provinsi Jambi) dan Danau Ranau (Provinsi Lampung dan Sumatera Selatan). Adapun sungai-sungai di Pulau Sumatera diantaranya yaitu, Sungai Asahan (Provinsi Sumatera Utara), Sungai Siak (Provinsi Riau), Sungai Kampar, Sungai Inderagiri (Provinsi Sumatera Barat dan Riau), Sungai Batang Hari (Provinsi Sumatera Barat dan Jambi), Sungai Musi, Sungai Ogan, Sungai Lematang, Sungai Komerling (Provinsi Sumatera Selatan), Sungai Way Sekampung, Sungai Way Tulangbawang, Sungai Way Seputih dan Sungai Way Mesuji (Provinsi Lampung), Sungai Batang Tarusan (Provinsi Sumatera Barat dan Sungai Ketahun (Provinsi Bengkulu). Batasan daerah Pulau Sumatera adalah:

Disebelah Utara: Teluk Belangga, Malaysia dan Singapura

Disebelah Selatan: Selat Sunda, Kepulauan Mentawai

Disebelah Barat: Samudera Hindia dan India

Disebelah Timur: Selat Malaka, Selat Karimata dan Pulau Kalimantan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis pengaruh migrasi masuk terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera

Berdasarkan hasil penelitian ini migrasi masuk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di pulau Sumatera. Hal ini dibuktikan dengan hasil olah data dimana koefisien variabel pendidikan sebesar -0.021687 dengan nilai signifikansi lebih dari $0,05$ ($0.0986 > 0,05$).

Penelitian yang menyatakan migrasi masuk tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera menunjukkan bahwa faktor-faktor lain seperti angkatan kerja, IPM, dan pertumbuhan ekonomi lebih dominan dalam menentukan tingkat kemiskinan di wilayah tersebut Amanda Septa et al., (2025). Berbeda dengan beberapa penelitian lain yang menemukan migrasi masuk memberikan kontribusi signifikan terhadap kemiskinan, terutama di perkotaan dengan kapasitas ekonomi terbatas. Namun keduanya sepakat bahwa pengelolaan faktor ekonomi dan sosial sangat penting untuk mengatasi kemiskinan secara efektif Resaski dan Marta, (2024).

Analisis pengaruh pendidikan terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera

Berdasarkan hasil penelitian ini pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di pulau Sumatera. Hal ini dibuktikan dengan hasil olah data dimana koefisien variabel pendidikan sebesar -1.295501 dengan nilai signifikansi kurang dari $0,05$ ($0.0000 < 0,05$).

Persamaan utama adalah bahwa sebagian besar penelitian di Pulau Sumatera menemukan bahwa pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan, artinya semakin tinggi pendidikan dapat menurunkan tingkat kemiskinan dengan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia, pendidikan yang tinggi juga dapat meningkatkan kesempatan kerja dan produktivitas masyarakat Hadi dan Andrianus, (2025). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surbakti et al., (2023) yang menemukan bahwa pendidikan berpengaruh negatif signifikan (semakin tinggi pendidikan, semakin rendah kemiskinan). Tetapi berbeda dengan penelitian yang dilakukan Iwang, (2023) yang menemukan bahwa pendidikan berpengaruh positif terhadap kemiskinan.

Analisis pengaruh upah minimum terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera

Berdasarkan hasil penelitian ini upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di pulau Sumatera. Hal ini dibuktikan dengan hasil olah data dimana koefisien variabel pendidikan sebesar -0.002325 dengan nilai signifikansi lebih dari $0,05$ ($0.7526 > 0,05$).

Beberapa penelitian menyatakan bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan menunjukkan bahwa faktor-faktor lain seperti pendidikan, pengangguran, jumlah penduduk, indeks pembangunan manusia (IPM) dan distribusi pendapatan yang tidak merata lebih dominan dalam menentukan tingkat kemiskinan Khoirudin, (2020). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Surya, (2024) yang menyatakan bahwa upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan. Oleh karena itu, sebesar apa pun upah minimum yang di patok oleh pemerintah, jika sumber daya manusia di kota tersebut tidak memiliki kemampuan atau pendidikan yang sesuai dengan yang dibutuhkan industri, maka upah minimum pada kota tersebut tidak berpengaruh kepada kemiskinan. Berbeda dengan beberapa penelitian lain yang menemukan upah minimum berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan Falaq dan Wijaya, (2024).

Analisis pengaruh migrasi masuk, pendidikan, dan upah minimum secara simultan terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera

Berdasarkan hasil penelitian ini migrasi masuk, pendidikan dan upah minimum berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera. Hal ini dibuktikan dengan hasil olah data dimana nilai F hitung lebih besar dari F tabel yaitu sebesar $44.59517 > 2,690303$ dan memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari $0,05$ ($0,0000 < 0,05$).

Penelitian ini menyatakan migrasi masuk, pendidikan dan upah minimum berpengaruh secara bersama-sama atau simultan terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera. Migrasi masuk berperan sebagai salah satu faktor demografis yang memengaruhi dinamika sosial-ekonomi, karena perpindahan penduduk dari daerah lain ke Pulau Sumatera dapat mempengaruhi struktur pasar tenaga kerja dan distribusi pendapatan. Tingkat pendidikan berfungsi sebagai indikator penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang bertujuan meningkatkan kemampuan individu dalam mendapatkan pekerjaan yang layak dan berpenghasilan memadai. Upah minimum sebagai kebijakan ketenagakerjaan turut menentukan standar penghasilan pekerja, sehingga memiliki dampak langsung pada pengurangan tingkat kemiskinan Salsabilla dan Pratomo, (2025).

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa:

1. Variabel migrasi masuk, pendidikan dan upah minimum secara individual atau parsial berpengaruh terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera.
- A. Migrasi masuk memiliki pengaruh yang beragam terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera. Beberapa penelitian menunjukkan migrasi masuk tidak berpengaruh signifikan secara langsung terhadap kemiskinan, karena dampak migrasi sangat bergantung pada kemampuan daerah tujuan dalam menyerap tenaga kerja dan

menyediakan fasilitas sosial. Namun secara umum, migrasi masuk dapat mempengaruhi struktur demografi dan perekonomian yang pada akhirnya berdampak pada tingkat kemiskinan, terutama jika tidak diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja dan pembangunan infrastruktur yang memadai.

- B. Untuk variabel pendidikan, secara konsisten menunjukkan bahwa tingkat pendidikan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera. Pendidikan yang lebih tinggi cenderung menurunkan kemiskinan karena meningkatkan kemampuan individu dalam memperoleh pekerjaan yang layak dan pendapatan yang lebih baik. Namun, ada pula penelitian yang menemukan pengaruh pendidikan tidak signifikan, yang kemungkinan disebabkan oleh faktor kualitas pendidikan, relevansi pendidikan dengan pasar kerja, atau variabel lain yang lebih dominan dalam konteks wilayah tertentu.
 - C. Sementara itu, sebagian besar penelitian menunjukkan upah minimum tidak berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera. dikarenakan nilai upah minimum seringkali masih dibawah kebutuhan hidup layak masyarakat dan sebagian besar penduduk miskin bekerja di sektor informal dimana aturan upah minimum tidak efektif diterapkan sehingga kenaikan upah minimum tidak langsung menurunkan angka kemiskinan. Akan tetapi jika kebijakan peningkatan upah minimum yang disertai dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia dan kesempatan kerja menjadi strategi penting dalam pengentasan kemiskinan.
2. Variabel migrasi masuk, pendidikan dan upah minimum secara bersama-sama atau simultan berpengaruh terhadap kemiskinan di Pulau Sumatera. Migrasi masuk dapat berdampak pada distribusi penduduk dan kesempatan ekonomi yang juga memengaruhi tingkat kemiskinan. Sementara pendidikan yang lebih tinggi cenderung menurunkan kemiskinan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Di sisi lain, upah minimum yang ditetapkan memiliki pengaruh yang kompleks terhadap kemiskinan, peningkatan upah minimum dapat meningkatkan pendapatan pekerja, namun dalam beberapa konteks juga dapat berdampak pada ketenagakerjaan dan kemiskinan tergantung pada kondisi pasar tenaga kerja lokal.

Saran

Adapun Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Lembaga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset Dan Teknologi (Kemendikbudristek) hendaknya memperkuat dan mengintegrasikan program-program peningkatan kualitas pendidikan sebagai salah satu strategi utama dalam pengentasan kemiskinan. Upaya ini dapat dilakukan melalui peningkatan akses dan mutu pendidikan, pengembangan keterampilan vokasi, serta penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan pasar tenaga kerja agar lulusan memiliki kompetensi yang relevan dan mampu meningkatkan daya saing serta pendapatan.
2. Pengelolaan migrasi masuk perlu direncanakan dan diatur secara komprehensif agar dapat memberikan manfaat maksimal bagi daerah tujuan migrasi tanpa menimbulkan dampak negatif seperti peningkatan pengangguran dan kepadatan penduduk yang tidak terkendali. Pemerintah daerah harus menyediakan peluang kerja yang memadai serta memperkuat infrastruktur sosial dan ekonomi untuk mendukung penyerapan tenaga kerja migran secara efektif. Dan untuk kebijakan

penetapan upah minimum harus dikombinasikan dengan peningkatan kesempatan kerja yang produktif dan pelatihan kerja guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hal ini penting karena kenaikan upah minimum saja belum terbukti signifikan menurunkan tingkat kemiskinan jika tidak diiringi dengan peningkatan produktivitas dan kemampuan pekerja. Pemerintah perlu mendorong kolaborasi antara dunia usaha dan lembaga pelatihan untuk memberikan pelatihan yang tepat sasaran bagi tenaga kerja berpendapatan rendah.

3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk lebih mendalami faktor-faktor yang menyebabkan variabel seperti migrasi masuk dan upah minimum tidak mempengaruhi signifikansi terhadap kemiskinan di beberapa wilayah di Pulau Sumatera.

DAFTAR PUSTAKA

- Aningtyas, E. H. (2017). Dampak Migrasi Penduduk pada Gaya Hidup Penduduk di Indonesia The impact of population migration on the Lifestyle of Population in Indonesia. 1–12. <http://ejurnal.untagsmd.ac.id/index.php/RJABM/article/view/3043/3014>
- Ayu, N. E. N., & Faisal, A. A. (2021). Mengukur Dampak Pengangguran, Tingkat Pendidikan, Upah Minimum, dan Pengeluaran Per Kapita Terhadap Kemiskinan di Kota Makassar. *Bulletin of Economic Studies*, 1(1), 1–12.
- Badan Pusat Statistik, (2023). Statistik Migrasi Indonesia hasil Long Form Sensus Penduduk 2020.
- Badan Pusat Statistik, (2025). Data Jumlah Penduduk Miskin Menurut Provinsi Di Indonesia (Jiwa) 2014-2024.
- Badan Pusat Statistik, (2025). Data Rata-Rata Lama Sekolah Menurut Provinsi Di Indonesia (Tahun) 2014-2024.
- Badan Pusat Statistik, (2025). Data Upah Minimum Provinsi/Regional (Rupiah) 2014-2024.
- Iwang, B. (2023). Analisa Indikator Sosial dan Ekonomi Terhadap Kemiskinan DI Provinsi Sulawesi Selatan. *Economics And Digital Business Review*, 4(2), 106–113.
- Ningsih, M., Nursini, & Sabir. (2023). Pengaruh Upah Minimum, Inflasi dan Investasi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Pulau Sulawesi. *Economics and Digital Business Review*, 4(2), 362–372.
- Nurkholis, A. (2018). Teori Pembangunan Sumberdaya Manusia: Human Capital Theory, Human Investment Theory, Human Development Theory, Sustainable Development Theory, People Centered Development Theory. *INA-Rxiv 8trv7*, Center for Open Science, 3–5.
- Nurkse, Ragnar. (1953). *Problems of capital Formation in Underdeveloped Countries*. New York: Oxford University Press.
- Santoso, R. P. (2012) *Ekonomi Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: UPP. STIM YKPN.
- Septa, A., Fairuzani, A., Yasmin, C., Hutagaol, G., & Hutabarat, V. (2025). Analisis Variabel Kemiskinan di Indonesia dengan Model Linear Regresi dan Algoritma K-Means pada Tahun 2020-2023. *Profit: Jurnal Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 4(2), 28–52. <https://doi.org/10.58192/profit.v4i2.3077>

- Solihin, D. (2014). Implementasi Kebijakan Pengentasan Kemiskinan. Cetakan Pertama, Jakarta: Yayasan Empat Sembilan Indonesia.
- Susanto, R., & Pangesti, I. (2019). Pengaruh Tingkat Pendidikan terhadap Kemiskinan di DKI Jakarta. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 5(4), 340.
- Tiwow, N. K. (2020). e-Modul Ekonomi. Repositori Kemdikbud, 1, 7–8.